

**PERAN UNMISS (UNITED NATIONS MISSIONS IN SOUTH SUDAN)
DALAM PEMBEBASAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN**

By: Bobby Soemantri

(bobbysoemantri.bs@gmail.com)

Preceptor: Irwan Iskandar S.Ip, M.A

Bibliografy: 8Journal and Research Paper,

16 Books, 5 Documents, 36Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is a diplomatic and strategy political study which describes UNMISS role in the release of child soldiers in South Sudan. This research will focus on how UNMISS resolving about child soldiers in South Sudan. This study interesting because describe about the UNMISS role in South Sudan. UNMISS must make the conflict in South Sudan is free from using child soldiers.

This is qualitative research which used descriptive methods, and collecting datas from some resources like books, journals, official publications and relevant websites. This paper used the pluralism perspective and International Organization Theory from Clive Archer. The object in this research is UNMISS as main actor in International Relations.

The results of this study indicate that UNMISS carried out several programs to reduce the use of child soldiers in South Sudan. UNMISS as a Communicator reports to the United Nations to be able to tighten applicable international law regarding the use of international law. UNMISS as facilitator also cooperates with government and opposition soldiers to reduce the use of child soldiers. UNMISS as motivator release the child soldiers and provide training for former child soldiers.

Keywords: International Organizations, Pluralism, Conflict, Child Soldiers, UNMISS (United Nation Mission South Sudan)

I. PENDAHULUAN

Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas, karena tidak hanya berdampak bagi Negara yang terlibat konflik saja tapi juga terhadap Negara yang mempunyai perhatian terhadap Negara yang terlibat konflik akan dampak yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang di dapatkan dari peperangan melainkan kerugian dan penderitaan bagi umat manusia. Dengan adanya sengketa bersenjata, hal ini mendekatkan umat manusia terhadap kematian atau kekerasan yang akan terjadi.

Konflik yang memicu terjadinya peperangan memang tidak jarang memakan banyak korban dan menimbulkan banyaknya efek kerugian akibat perang. Salah satu dari sekian banyak yang terkena efek perang adalah anak-anak. Anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa perang tersebut terjadi dan tidak mengetahui sebab terjadinya perang itu sendiri. Namun meskipun demikian, tidak jarang beberapa dari antara mereka tidak hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan malah menjadi pelaku perang itu sendiri.

Fenomena tersebut dikenal dengan nama *Child Soldier* (tentara anak) yang kerap kali tidak menjadi fokus utama pemerintah ketika terjadinya perang. Sebagaimana dalam kasus tentara anak di Sudan Selatan, dimana konflik yang baru terjadi pada tahun 2013, tidak dipungkiri bahwa penggunaan tentara anak semasa perang ini telah banyak terjadi. Baik oleh pemerintah Sudan Selatan maupun pihak pemberontak.

Sudan Selatan pada mulanya merupakan bagian kenegaraan Sudan Utara sejak tahun 1956, namun karena negara tersebut mengalami perpecahan dan konflik kekerasan yang berkepanjangan, kedua negara sepakat untuk mengakhiri perang saudara melalui *Comprehensive Peace Agreement* tahun 2005. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi Sudan Selatan untuk mengajukan referendum *self-determination*.

Keberhasilan referendum tersebut ditunjukkan dengan deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan pada tanggal 9 Juli 2011. Sudan Selatan kemudian resmi menjadi negara termuda di dunia dan terdaftar sebagai anggota ke-193 di PBB.¹ Sekaligus salah satu negara paling terbelakang dan penuh dengan perpecahan etnis yang belum terselesaikan, sehingga pembangunan negaranya masih diarahkan terutama pada state-building (membangun instansi pemerintah) dari pada *nation-building* (menempa interaksi *state-society*).²

Politik antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon. Perkelahian antara tentara pemerintah, *Sudan People's Liberation Army* (SPLA), yang setia kepada presiden dan tentara yang mendukung Machar terjadi pada tanggal 16 Desember 2013. Argumen antar kelompok diyakini telah

¹ BBC, *South Sudan Profile*, <http://www.bbc.com/news/world-africa-14019202> diakses pada tanggal 14 maret 2018

² International Rescue Committee, *South Sudan's Displacement Crisis*, 2014, http://www.rescue.org/sites/default/files/resourcefile/SouthSudan_report_v5.pdf diakses pada tanggal 14 Maret 2018

memicu bentrok yang menewaskan sekitar 20 orang.³

Sekitar 400.000 anak dipaksa keluar dari sekolah. Perekrutan dan penggunaan tentara anak telah terjadi dalam konteks perang dimana kedua tentara, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan Pasukan Pembebasan Rakyat Sudan- dalam pasukan Oposisi dan sekutu mereka melakukan tindakan yang luar biasa.⁴

Dalam minggu-minggu berikutnya, pasukan yang terdiri dari tentara Nuer yang telah membelot dan bersekutu dengan pasukan "tentara putih" yang terdiri dari Nuer bersenjata, merebut kota Bor, Negara bagian Jonglei. Mereka menggeledah kota dan sekitarnya, menewaskan ratusan warga sipil Dinka yang meninggalkan jenazah mereka yang berserakan disekitar daerah tersebut.

Serangan oleh pemerintah dan pasukan oposisi antara pertengahan Desember 2013 dan pertengahan April 2013 di wilayah konflik Jonglei, Unity dan Upper Niler membuat ribuan warga sipil lainnya tewas dan kota-kota dijarah dan dihancurkan.⁵ Periode ini paling berdarah dan destruktif sejak Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011 dari Sudan dan mungkin merupakan

yang paling mengerikan dalam empat bulan terakhir dalam konflik intermiten di wilayah ini. Pelecehan brutal terhadap warga sipil terus berlanjut.⁶ Periode ini paling berdarah dan destruktif sejak Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011 dari Sudan dan mungkin merupakan yang paling mengerikan dalam empat bulan terakhir dalam konflik intermiten di wilayah ini. Pelecehan brutal terhadap warga sipil terus berlanjut.⁷ Tidak adanya pertanggung jawaban atas kejahatan perang masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia telah memicu serangan baru dan pembunuhan dalam konflik saat ini.

Kekerasan, kejahatan, pelecehan dan balas dendam, terutama untuk anak laki-laki adalah bagian dari pertumbuhan bahkan sebelum konflik dimulai. Kehidupan bagi banyak orang di daerah Dinka dan Nuer dan komunitas penggarap ternak lainnya sejak tahun 2011 telah dirusak oleh konflik antar komunal yang meningkat dalam bentuk serangan ternak yang kejam dan serangan balas dendam ke desa-desa. Banyak pemberontakan bersenjata oleh milisi berbasis etnis juga telah terjadi dan anak laki-laki juga terlibat dalam pertempuran ini. Pemberontak dan pasukan pemerintah dalam upaya pemberontakan kontra mereka telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.⁸

³ C. Koos & T. Gutschke, *South Sudan Newer's War: When Two Old Men Divide a Nation*, German Institute of Global and Area Studies, ISSN 2196-3940, 2014, No 2 http://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_international_1402_new.pdf diakses pada tanggal 14 maret 2018

⁴ *Ibid*

⁵ *New Sudan's New War: Pelanggaran oleh Pemerintah dan Pasukan Oposisi*, Agustus 2014. (<https://www.Hrw.org/report/2014/08/07/south-sudans-new-war/abuses-government-and-opposition-forces>). Diakses pada 14 maret 2018

⁶ *They Burned it All: Destruction of Villages, Killings and Sexual Violence in South Sudan's Unity State*, July 2015, <https://www.hrw.org/report/2015/07/22/they-burned-it-all/destruction-villages-killings-and-sexual-violence-unity-state> diakses pada 14 maret 2018

⁷ *Ibid*

⁸ *They Are Killing Us: Abuses by Civilians in South Sudan's Pibor County*, September 2013,

Masa anak-anak adalah masa dimana mereka berada disekolah dan bermain, dan tumbuh berkembang dengan cinta dan kasih sayang. Hal ini merupakan waktu yang paling berharga bagi masa anak-anak, dimana anak-anak dapat hidup bebas dari rasa takut, aman dari kekerasan, dan dilindungi dari segala macam pelecehan dan eksploitasi. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar tetap hidup.

Anak-anak yang dianggap sebagai penerus generasi bangsa merupakan korban yang paling rentan terhadap berbagai jenis konflik senjata, tidak hanya secara psikis maupun secara fisik. Dalam konflik bersenjata kerap kali anak-anak diikutsertakan dalam peperangan. Telah disebutkan dalam Global Report on Childs Soldier 2001⁹ lebih dari 300.000 anak dibawah usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah, milisi ataupun kelompok bersenjata bukan Negara dan mereka dijadikan sebagai tentara, mata-mata atau pekerjaan lain yang terlibat secara langsung konflik bersenjata.

Anak-anak yang seharusnya memperoleh kebudayaan perdamaian (*culture of piece*)¹⁰ telah dididik oleh

<https://www.hrw.org/report/2013/09/12/they-are-killing-us/abuses-against-civilians-south-sudans-pibor-county> diakses pada 14 maret 2018

⁹ <https://www.child-soldiers.org/shop/global-report-2001> , diakses pada tanggal 14 maret 2018

¹⁰ *Culture of piece is a commitment to peace-building , mediation, conflict prevention and resolution , peace education , education for non-violence, tolerance, acceptance, mutual respect, intercultural and interfaith dialogue and reconciliation. Culture of peace based on UNESCO*

pelatihan militer serta mendapatkan kekerasan dan sudah terjun langsung dalam medan perang. Anak-anak yang yang seharusnya jauh dari segala macam bahaya, namun dalam situasi ini anak-anak justru ikut terlibat dalam konflik bersenjata serta sudah membawa senjata api sejak dini. Meskipun sebenarnya perekrutan anak-anak menjadi tentara bukanlah suatu fenomena baru, namun kini semakin banyak orang dewasa yang telah kehilangan nurani dan memaksa anak menjadi tentara.

Anak-anak memang tidak seharusnya ikut berperang apalagi menjadi tentara. Kenyataannya banyak anak yang direkrut untuk berperang. Mereka dikerahkan di 75% wilayah konflik, baik sebagai anggota tentara regular maupun milisi, pemberontak, paramiliter. Sebanyak 80% dari anak-anak yang menjadi tentara itu berusia di bawah 18 tahun. Beberapa dari mereka bahkan berusia 8 tahun.

Pada 8 Juli 2011 Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi nomor 1996 dan memutuskan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut dan mendirikan Misi PBB di Republik Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode awal satu tahun dari sejak 9 Juli 2011 dan dapat memperpanjang periode apabila dianggap diperlukan. Sejumlah lebih dari 2.000 anggota staf sipil internasional dan nasional, 203 pengamat militer PBB, 64 staf kantor dan 378 polisi PBB telah secara resmi ditransfer dari Misi PBB di Sudan (UNMIS) kedalam

Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS).¹¹

Mandat UNMISS adalah untuk mendukung Pemerintah dalam konsolidasi perdamaian dan dengan demikian mendorong pembangunan negara jangka panjang dan pembangunan ekonomi; membantu Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk pencegahan konflik, mitigasi, dan resolusi dan melindungi warga sipil; dan membantu pihak berwenang dalam mengembangkan kapasitas untuk memberikan keamanan, membangun supremasi hukum, dan memperkuat sektor keamanan dan keadilan di Sudan Selatan.¹²

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Pluralisme. Perspektif Pluralisme memandang bahwa dalam suatu tindakan atau kegiatan hubungan internasional tidak hanya negara yang menjadi aktor melainkan terdapat aktor non negara yang berperan penting dalam suatu kegiatan dalam hubungan internasional tersebut.¹³

Ide-ide dalam perspektif Pluralisme adalah sebagai berikut:¹⁴

¹¹ *Security Council. Report of Secretary General South Sudan S/2011/678*, dapat diakses pada <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Sudan%20S%202011%20678.pdf>

¹² *Security Council. (1999, October). Security Council Meeting Record S/PV.4054.* http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4054 , diakses pada 14 Maret 2018.

¹³ M.Saeri, *Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan Paradigmatik*, (Pekanbaru: Jurnanl Transnasional, 2012), Vol.3 No.2

¹⁴ *Ibid*

1. Negara bukanlah satu-satunya aktor. Negara terdiri dari birokrat, kelompok-kelompok kepentingan dan individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Negara bangsa bukanlah entitas yang terintegrasi, karena negara dan aktor non negara sering terlibat bersama dalam memformulasi aktivitas dan hubungan internasional dan menerima akibat dari aktivitas internasionalnya
2. Negara bukan aktor rasional. Proses pengambilan kebijakan luar negeri bukanlah proses sosial. Proses pengambilan kebijakan luar negeri merupakan koalisi dan kontrakoalisi yang menyebabkan dapat mengurangi optimalisasi tujuan yang ingin dicapai.
3. Aktor non negara merupakan kenyataan yang penting dalam proses terjadinya hubungan internasional UNMISS sebagai contoh dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan para birokrat dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan.
4. Agenda politik internasional sangat luas. Penganut pluralis menolak dominasi isu militer dan keamanan dalam hubungan internasional. Hubungan internasional memiliki

agenda yang sangat luas dan bervariasi. Sejak tiga puluh tahun terakhir isu-isu ekonomi dan sosial bahkan mengambil posisi terdepan dalam perdebatan internasional.

Berdasarkan perspektif yang telah penulis paparkan di atas perspektif pluralisme dianggap paling sesuai dengan penelitian penulis, dimana aktor yang berperan tidak hanya negara saja tetapi terdapat pula organisasi internasional seperti UNMISS.

Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional menurut Clive Archer: “*can be defined as a formal continuous structure established by agreement between members (governmental or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership*”.¹⁵ Archer mengatakan bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama.

Sementara itu Michael Hass mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian, yaitu: (i) sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan; (ii) organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak

ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.¹⁶

Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.¹⁷

Pada dasarnya konsep organisasi Internasional itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:¹⁸

1. *Inter-Governmental Organizations/IGO*
(Organisasi antar pemerintah); anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia. Contoh: PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan WTO (*World Trade Organization*).
2. *Non-Governmental Organizations/NGO*
(Organisasi non pemerintah); merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Contoh: WWF (*World Wildlife Fund*), *World Vision*, *Care International*, UNMISS dan sebagainya.

¹⁶ Michael Hass dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, (New York: The Free Press, 1969), hal 131

¹⁷ Le Roy A. Bennet. *International Organizations: Principles and Issues*. (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997), hal 2-4.

¹⁸ *Ibid*

¹⁵ Clive Archer, *International Organization*, (London: George Allen and Unwin Publisher, 1983). hal 35.

Sementara itu fungsi dari organisasi internasional menurut A.Le Roy Bennet adalah:¹⁹

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintahan, sehingga ketika masalah muncul ke permukaan, ide-ide dapat bersatu.

Dari ketiga kategori diatas, eksplorasi dan analisis yang dilakukan oleh organisasi internasional, akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator.²⁰

Konsep Resolusi Konflik

Dalam menganalisis konflik yang terjadi di Sudan Selatan, penulis menggunakan konsep resolusi konflik untuk mempermudah menganalisis kasus tersebut.

Konflik adalah aspek intrisik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Situmorang dalam Andre Pareira, ed. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 135.

²¹ Hugh Miall, O. R. *Pengantar Penyelesaian Konflik*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002).

Resolusi konflik adalah suatu proses penyelesaian masalah dalam konflik dengan tidak adanya pemaksaan dan kekerasan dalam mengontrol konflik. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dalam resolusi konflik dalam mengurangi konflik yang telah mengakar dalam.²²

Menurut Johan Galtung, konsep resolusi konflik memiliki tiga tahap dalam penyelesaian konflik, yaitu:²³

1. Definisi *Peacekeeping*

Peacekeeping adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.²⁴

Misi pengamatan militer di atas dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, yang biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Para tentara dari pasukan perdamaian memiliki persenjataan, namun kebanyakan digunakan untuk melindungi diri sendiri.²⁵

Peacekeeping merupakan konsep yang dimiliki oleh PBB dalam menanggapi tantangan yang diberikan dunia saat ini dengan melakukan teknik-teknik yang ada kemudian dilakukan pembicaraan antarnegara dan juga situasi internal negara yang bertikai akibat perang saudara.²⁶ *Peacekeeping* merupakan

²² Burton, J. *Conflict: Resolution and Provention*, (New York: Martin Press, 1990).

²³ Hermawan, Y. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Department of Public Information. Basic Facts about the United Nations revised ed.* New York: United Nations Department of Public Information. 2011.

²⁶ Henderson, C. W. *International Relations: Conflict and Cooperations at the*

salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB untuk membantu mencapai tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

2. Definisi *Peacemaking*

Peacemaking (menciptakan perdamaian) yaitu bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi. Atau bisa juga diartikan sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.²⁷

Menurut Vinsensio Dugis dalam bukunya yang dimaksud dengan mediasi yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi ketika terdapat pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Kemudian pengertian negosiasi yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Sedangkan penyelesaian konflik melalui arbitrase terjadi ketika peran pihak ketiga berada pada posisi yang lebih menentukan proses perundingan, yang dimungkinkan karena kewibawaan atau kekuatan lain yang dimiliki oleh pihak ketiga serta mempunyai legitimasi.

3. Definisi *Peacebuilding*

Peacebuilding (menggali perdamaian) yaitu usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengantarkan

turn of 21 Century. (McGraw-Hill International, 1997).

²⁷ *Op. Cit* Hermawan

penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian.²⁸

Tingkat Analisa

Tingkatan analisis adalah target analisis dimana peneliti dapat memperoleh lembaran (*description*), penjelasan (*explanation*) dan perkiraan (*prediction*) yang akurat tentang perilaku negara.²⁹ Dengan kata lain, tingkatan analisa memudahkan penulis untuk meneliti mengenai objek penelitian.

Yessi Olivia mengakui bahwa ada tiga level analisis dasar, yaitu :

1. Level analisis sistem internasional, menjelaskan pengaruh distribusi kekuatan antar banyak negara super power terhadap negara lain.
2. Level analisis negara, menjelaskan tentang perilaku negara yang ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut.
3. Level analisis individu, memfokuskan penelitian pada manusia sebagai actor dalam hubungan internasional.

II. ISI

UNMISS sebagai komunikator memberikan laporan kepada PBB

Sudan Selatan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Sudan Selatan, menjadi negara merdeka dan negara ke-55 Afrika. Meskipun Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia, tidak asing dengan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Konflik terbaru, yang meletus pada pertengahan Desember 2013,

²⁸ *Ibid*

²⁹ Olivia Yessi. *Level Analisa Sistem dan Teori Hubungan Internasional.* (Pekanbaru: Jurnal Transnasional. 2013). Vol.5. No.1, Hlm. 892

berlanjut pada 2015 (terlepas dari penandatanganan perjanjian damai), dan semakin meningkat pada 2016, semakin memburuk dan menjadi perhatian khusus bagi nasib buruk anak-anak. Pertempuran semakin intensif di Sudan Selatan daerah selatan di tengah bentrokan di ibukota. Sementara konflik pada awalnya dipicu oleh masalah politik, dimensi etnis dengan cepat muncul dengan efek yang menghancurkan pada anak-anak.³⁰

Penggunaan anak-anak tetap merajalela dan sedang meningkat untuk tahun keempat. Pelanggaran serius lainnya terhadap anak-anak sedang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik, dengan peningkatan yang signifikan dicatat pada paruh kedua 2016. Sejak 2013, 2.342 anak-anak telah terbunuh atau cacat, 3.090 anak-anak diculik, dan 1.130 anak-anak telah dilecehkan secara seksual. Anak-anak digunakan untuk berperang dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan warga sipil lainnya, atau melayani sebagai pendamping, juru masak, dan tukang cuci atau untuk membawa beban berat saat di pindah. Sekolah dan rumah sakit juga terus menjadi subjek serangan atau digunakan oleh kelompok bersenjata atau pasukan pemerintah, dengan 303 insiden sekolah atau rumah sakit diserang atau digunakan untuk keperluan militer.³¹

³⁰ UNHCR, 'South Sudan Regional Response Plan available

<http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/SOUTH%20SUDAN%202017%20Regional%20Response%20Plan.pdf> diakses pada 14 Mei 2019

³¹ UNICEF, 'Rise in child recruitment as conflict in South Sudan enters fourth year' <http://www.childsoldiers.org/unicef-and-lgen-dallaire-call-for-urgent-action-to-protect-children-from-becoming-soldiers-in-south-sudan/> diakses pada 14 Mei 2019

Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai Organisasi Internasional mempunyai tujuan dan tugas yang besar dan luas, khususnya di bidang perlindungan hak-hak anak. Sehingga apabila ditelusuri lebih jauh perjuangan melindungi hak-hak anak merupakan lanjutan dari perjuangan sejarah kemanusiaan sendiri yang hati nuraninya tidak dapat menerima manusia lain dikurangi hak azasi, terlebih lagi diperlakukan sebagai obyek yang tidak mempunyai hak-hak apapun.

UNMISS sebagai fasilitator bekerjasama dengan pihak pemerintah dan Oposisi dalam menangani permasalahan tentara anak.

Ribuan anak telah bertempur dalam konflik Sudan Selatan baru-baru ini dan puluhan ribu masih berisiko dalam perekrutan. Sejak perang Sudan Selatan baru-baru ini, yang dimulai pada bulan Desember 2013, baik pemerintah maupun pemimpin oposisi tidak mengakhiri perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak yang luas meskipun berjanji untuk melakukannya. Sebuah perjanjian damai yang ditandatangani pada Agustus 2015 antara pemerintah Presiden Salva Kiir dan oposisi yang dipimpin oleh mantan Wakil Presiden Riek Machar dapat mengakhiri pertempuran dan akhirnya memberikan pembebasan tentara anak-anak, tetapi kecuali jika ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan akuntabilitas, konflik lebih lanjut kemungkinan akan disertai oleh perekrutan anak.

Laporan ini didasarkan pada wawancara pada tahun 2014 dan 2015 dengan 101 anak yang terkait atau sebelumnya terkait dengan

[protect-children-from-becoming-soldiers-in-south-sudan/](http://www.childsoldiers.org/unicef-and-lgen-dallaire-call-for-urgent-action-to-protect-children-from-becoming-soldiers-in-south-sudan/) diakses pada 14 Mei 2019

angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok dari suku Dinka, Nuer dan Shilluk, sebagian besar dari tiga negara bagian Unity, Jonglei dan Upper Nile. Beberapa anak berusia 13 tahun tetapi kebanyakan dari mereka berusia antara 15 dan 17 tahun. Ini menggambarkan pengalaman mereka direkrut, pertempuran dan hidup sebagai bagian dari kekuatan tempur. Human Rights Watch mendengar pernyataan kemarahan, rasa sakit emosional, kepuasan dan fatalisme yang suram, tetapi karena tentara anak-anak telah menandai banyak sejarah kekerasan di Sudan Selatan, beberapa anak menyatakan terkejut bahwa mereka berjuang.

Baik Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan sekutu mereka, dan Oposisi Tentara Pembebasan Rakyat Sudan dan sekutu mereka telah bertempur dengan anak-anak. Laporan ini mencakup informasi tentang perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak oleh, antara lain, mantan pemimpin pemberontak David Yau Yau, yang belum bertempur dalam konflik baru-baru ini (tetapi mungkin melakukannya jika pertempuran terus berlanjut), Johnson Olony yang telah bertempur di kedua pihak pemerintah dan pihak oposisi dalam konflik baru-baru ini, dan Matthew Puljang, yang telah membantu pemerintah mengendalikan sebagian besar negara Persatuan. Di negara kesatuan, komandan oposisi Peter Gadet dan James Koang dan wakilnya Makal Kuol telah menggunakan tentara anak-anak sebagai pengawal atau memimpin mereka dalam pertempuran.³²

³²

<https://www.refworld.org/docid/498805cb32.html> diakses pada 20 Mei 2019

Selama beberapa dekade, warga sipil Sudan Selatan telah menderita kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia saat hidup melalui perang saudara, pemberontakan, dan konflik antar suku yang dipecah secara etnik dan brutal. Perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai pejuang dan tentara telah menjadi ciri khas dari konflik-konflik ini. Anak laki-laki, yang dianggap oleh diri mereka sendiri dan orang lain sebagai memiliki tugas untuk melindungi komunitas dan ternak mereka dalam menghadapi bahaya yang sering terjadi - termasuk dari pasukan pemerintah - terus berpartisipasi dalam kekerasan. Sebelum perang Sudan Selatan dimulai pada Desember 2013, hasil-hasil penting telah dicapai dalam meningkatkan akses ke pendidikan dan mengakhiri norma tentara anak-anak, termasuk melalui undang-undang yang melarang praktik tersebut. Tetapi skala perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik baru-baru ini, termasuk perekrutan paksa yang brutal, telah sangat mengikis kemajuan sebelumnya dalam meningkatkan hak-hak anak.

UNMISS sebagai motivator membebaskan tentara anak dan memberikan pelatihan bagi mantan tentara anak

Sudan Selatan telah mengalami banyak pergolakan dengan kekerasan. Dan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak meletusnya perang saudara pada tahun 2013, baik militer maupun kelompok-kelompok bersenjata lawan dalam konflik telah merekrut sekitar 19.000 anak-anak sebagai tentara. Pada 2015, pihak-pihak dalam konflik menandatangani Perjanjian tentang Resolusi Konflik di Sudan Selatan

(ARCSS). Dalam perjanjian ini, pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk tidak merekrut dan menggunakan tentara anak-anak. Namun, dalam wawancara yang dilakukan oleh Human Rights Watch (HRW), mantan tentara anak-anak menyatakan bahwa komandan dari pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak telah menculik, menahan dan memaksa anak-anak, sebagian berusia 13 tahun, ke dalam barisan mereka.³³

Dalam kasus di mana tentara anak-anak telah digunakan dalam konflik bersenjata, berbagai inisiatif telah dibuat untuk membuat mereka kembali ke masyarakat semulus mungkin. Ini termasuk pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR). Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip dan Pedoman Paris tentang Anak yang Terkait dengan Angkatan Bersenjata atau Kelompok Bersenjata.

Komponen militer dari Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) hadir di daerah-daerah yang terkena dampak konflik, melakukan patroli lapangan secara teratur. Unit Perlindungan Anak UNMISS karenanya dapat mengandalkan pada komponen militer untuk dukungan dalam mengumpulkan informasi tentang pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak. Untuk melembagakan ini, Unit Perlindungan Anak UNMISS telah bekerja erat dengan the Force Komandan untuk mengeluarkan Perintah Perintah pada bulan November 2014, yang menetapkan peran militer dalam berkontribusi dalam pemantauan dan pelaporan

enam pelanggaran berat. UNMISS selanjutnya menetapkan titik fokus perlindungan anak militer untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak dan untuk membangun kapasitas perlindungan anak dari komponen militer.³⁴

III. KESIMPULAN

Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas, karena tidak hanya berdampak bagi Negara yang terlibat konflik saja tapi juga terhadap Negara yang mempunyai perhatian terhadap Negara yang terlibat konflik akan dampak yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang di dapatkan dari peperangan melainkan kerugian dan penderitaan bagi umat manusia. Dengan adanya sengketa bersenjata, hal ini mendekatkan umat manusia terhadap kematian atau kekerasan yang akan terjadi.

Konflik yang memicu terjadinya peperangan memang tidak jarang memakan banyak korban dan menimbulkan banyaknya efek kerugian akibat perang. Salah satu dari sekian banyak yang terkena efek perang adalah anak-anak. Anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa perang tersebut terjadi dan tidak mengetahui sebab terjadinya perang itu sendiri. Namun meskipun demikian, tidak jarang beberapa dari antara mereka tidak hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan malah menjadi pelaku perang itu sendiri.

³³ <https://www.justiceinfo.net/en/other/37569-the-challenges-of-reintegrating-child-soldiers-in-south-sudan.html> diakses pada 21 Mei 2019

³⁴ <https://www.enca.com/africa/help-released-child-soldiers-build-a-future-un> diakses pada 21 Mei 2019

Fenomena tersebut dikenal dengan nama Child Soldier (tentara anak) yang kerap kali tidak menjadi fokus utama pemerintah ketika terjadinya perang. Sebagaimana dalam kasus tentara anak di Sudan Selatan, dimana konflik yang baru terjadi pada tahun 2013, tidak dipungkiri bahwa penggunaan tentara anak semasa perang ini telah banyak terjadi. Baik oleh pemerintah Sudan Selatan maupun pihak pemberontak. Anak-anak memang tidak seharusnya ikut berperang apalagi menjadi tentara. Kenyataannya banyak anak yang direkrut untuk berperang. Mereka dikerahkan di 75% wilayah konflik, baik sebagai anggota tentara regular maupun milisi, pemberontak, paramiliter. Sebanyak 80% dari anak-anak yang menjadi tentara itu berusia di bawah 18 tahun. Beberapa dari mereka bahkan berusia 8 tahun. Penggunaan tentara anak di Sudan Selatan sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu PBB membentuk misi perdamaannya di Sudan Selatan. UNMISS merupakan misi perdamaian untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Sudan Selatan termasuk didalamnya adalah penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata. UNMISS melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penggunaan anak-anak sebagai tentara di Sudan Selatan. UNMISS tidak sendiri dalam melakukannya, UNMISS bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya salah satunya adalah UNICEF. PBB memainkan peran sentral dalam mengurangi ketegangan internasional, mencegah konflik dan mengakhiri pertempuran yang sedang berjalan. PBB telah membantu menghapus banyak

penyakit dan memperluas produksi pangan. Selain itu, ia peduli dan melindungi pengungsi, memberantas buta huruf dan merespon dengan cepat terhadap bencana alam. Juga melindungi dan mempromosikan hak-hak individu dengan menetapkan standar global untuk hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Brown, J. A. *South Sudan's Slide into Conflict Revisiting the Past and Reassessing Partnerships*. Chatham house the royal institute for international affair.2014
- C. Koos & T. Gutschke..*South Sudan Newest's War: When Two Old Men Divide a Nation*. German Institute of Global and Area Studies,ISSN 2196-3940, 2014 No 2.
- Grace M.S.N Sihombing. PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI DARFUR, SUDAN PERIODE 2003-2005. Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016.
- Gray, C. *International Law and the Use of Force*. Oxford University Press, 3rd ed.2008
- Hutchinson, Sharon E and Jok Madut Jok. Gendered violence and the militarisation of ethnicity: a case study from south sudan : in richard p. Werbner (ed), postcolonial subjectivities in africa.

- London : zed book. 2000
Vol 16 No 3
- M. E.. *Resolving Internal Conflicts in the Post-Cold War Era: Is Peacekeeping Enough? Journal of Economic and Social Research*,2006, Vol 8, No 2
- Willmot, H., & Sheeran, S.. *The protection of civilians mandate in UN peacekeeping operations: reconciling protection concepts and practices. International Review of the Red Cross*,2013. Volume 95, Issue 891-892 . Yilmaz,
- A.Awolich, Abraham. The Unwarranted Carnage in South Sudan. Juba, South Sudan, 2014.
- Abdul Rahman Abu Zayed Ahmed, *Why the violence?*, London: Panos Institute, 1988.
- Bagong Suyanto dan Satinah. *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media Group. 2006
- Department of Peacekeeping Operations. *Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. New York: United Nations Department of Peacekeeping Operations*. 2008
- Encyclopedia Britannica. World Affairs: South Sudan. Britain: Encyclopedia Britannica Inc.*2014
- Grover, Sonja C.Humanity's Children: ICC Jurisprudence and the Failure to Address the Genocidal Forcible Transfer of Children. Berlin: Springer.2013
- Hamid Patiluna. *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: CV Alfabeta. 2005
- Hans Kochler, *Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics*,International Progress Organization, 2001.
- Henderson, C. W. *International Relations: Conflict and Cooperations at the turn of 21 Century. Megraw-Hill International*. 1997
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, cet. V. 2004
- Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill, 1979.
- Mochtar Masoed. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. 1990
- Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia, 1990
- Peter adwok Nyaba. *The politics of liberation in south sudan : an insiders view*. 1996. Africa : Fountain Publication.
- Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press*, 1999.
- Stamnes, E. (2015). *The United Nations Mission in the*

- Republic of South Sudan (UNMISS): Protecting Civilians in a Volatile Environment. Norwegian Institut of INternational Affair.*
- The Sudd Institute, South Sudan's Crisis: Its Drivers, Key Players, and Post-conflict Prospects, 2014
- Web**
- BBC.South Sudan Profile. <http://www.bbc.com/news/worldafrica>
- CIA fact book: Sudan Country profile. <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html>. (Diakses tanggal 18 Desember 2018)
- Heidelberg Institute for International Conflict Research. 2013. Disputes Non-Violent Crises and Limited Wars in South Sudan (SPLA defectors)[pdf].* http://hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2013.pdf
- <http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/14/05/10/n5culn-dua-pemimpin-konflik-disudan-selatan-akhirnya-sepakati-perjanjian-damai>
- <http://news.detik.com/australiaplus/2638577/alami-kelaparan-50000-anak-sudan-selatanterancam-mati>
- <http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/01/s-sudan-government-rebels-sign-truce-deal-20141232213398412.html>
- <http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/01/s-sudan-government-rebels-sign-truce-deal-201412322>
- <http://www.antaranews.com/berita/410707/tiga-pesawat-as-ditembaki-di-sudanselatan>
- http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150227_cina_sudan
- <http://www.bbc.com/news/world-africa-14019202> diakses pada tanggal 14 maret 2018
- <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/10/23/ndw4ds-pbb-pasukan-cinadikerahkan-ke-sudan-selatan-pada-2015>
- http://www.rescue.org/sites/default/files/resourcefile/SouthSudan_report_v5.pdf
- <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/background.shtml>
- http://www.unicef.org/media/media_79847.html
- <http://www.voaindonesia.com/content/presiden-sudan-selatan-dan-panglima-pemberontaksepakati-perdamaian/2624251.html>
- <https://unmiss.unmissions.org/about-unmiss>
- <https://unmiss.unmissions.org/sudan-people's-liberation-army-keen-be-removed-un-child-soldiers-register>